Nama: Noermah

Nim: 10200120170

Kelas: Htn-D

RESUME HUKUM TATA NEGARA

“ PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM”

PARTAI POLITIK (PARPOL)

A. Pengertian Partai Politik

Pengertian partai politik menurut beberapa ahli, antara lain :

1. Menurut Budiardjo partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.
2. Menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.
3. Menurut Edmund Burke partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk memperromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujuai.
4. Menurut Sigmund Neuman partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.
5. Menurut R.H. Soltau partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan mengusai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

B. Peranan Dan Fungsi Partai Politik

Dalam perkembangan politik kontemporer terdapat sejumlah fungsi partai politik diantaranya adalah :

1. Fungsi Komunikasi Politik

Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang di perintah yaitu menmapung informasi dari masyarakat untuk

disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat berupa pendapat dan aspirasi diatur dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pihak pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan – kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik berbeda dalam berbagai negara.

2. Sebagai Sarana Artikulasi dan Aggregasi kepentingan

Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan masyarakat. Proses untuk mengolah merumuskan dan menyalurkan pendapat, aspirasi atau tuntutan itu kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan tersebut disebut artikulasi kepentingan. Dalam prakteknya artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi dapat juga dijalankan oleh kelompok kepentingan. Adapun proses penggabungan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat dinamakan agregasi kepentingan yang tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi juga oleh kelompok kepentingan.

3. Sarana Sosialisasi Politik

Disamping menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya, partai politik harus juga menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Partai politik harus mendidik masyarakatnya agar mempunyai kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara yang disebut sosialisasi politik. Pada umumnya kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pemberian pemahaman politik dengan cara pemaparan atau ceramah tentang politik. Di negara – negara yang sedang berkembang fungsi utama sosialisasi politik biasanya lebih banyak di tuju pada usaha memupuk integrasi nasional terutama kepada bangsa yang heterogenitas.

4. Fungsi Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik untuk mempersiapkan calon – calon pemimpin. Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapkan menjadi pemimpin di masa depan. Rekrutmen politik juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik yang bersangkutan. Dengan cara demikian proses regenerasi akan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin.

5. Sarana Pembuatan Kebijakan

Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan. Akan tetapi jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan, sebab fungsinya hanya mengkritik kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

6. Fungsi Pengatur Konflik

Partai politik berfungsi sebagai saran pengatur konflik atau mencari consensus, dimana di negara – negara yang menganut paham demokrasi, masalah perbedaan pendapat dan persaingan merupakan suatu hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan pendapat dan persaingan itu dapat menimbulkan konflik – konflik atau pertentangan antara mereka.

7. Fungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik

Partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus melahirkan program politik. Program politik dalam hal ini didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu – isu nasional baik langsung maupun tidak langsung dengan konstalasi persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan perhatian publik.

Yang membedakannya antara satu partai politik dengan yang lainnya adalah ideologi yang digunakannya untuk menganalisis dan menyusun program politik. Masing – masing partai politik memiliki system ideologi yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga program politik yang dihasilkan akan berbeda satu dengan yang lain.

8. Integrasi Sosial Dalam Partai Politik

Proses integrasi ini dapat menggunakan dua mekanisme, yaitu :

- Pertama dengan menggunakan mekanisme control internal, ini digunakan dengan membuat peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota partai politik. Misalnya dengan merumuskan AD dan ART bagi setiap partai politik. Hal ini bertujuan agar terbentuk perilaku yang sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi partai politik.
- Kedua adalah fungsi koordinasi, yaitu menghubungkan satu individu dengan individu yang lainnya.

9. Profesionalisme Partai Politik

Untuk membuat partai politik dapat berlangsung lama (sustainable). Yang harus dilakukan yaitu dengan menciptakan profesionalisme politik pada organisasi dan para politisinya.

Profesionalisme organisasi dapat dilakukan dengan menerapkan semua ketentuan dan peraturan, baik yang ditetapkan ditingkat nasional maupun didalam struktur organisasi partai politik itu sendiri. Ketentuan tentang system rekrutmen, seleksi, kaderisasi, pemuluan ketua partai politik, dan pemeliharaan calon partai harus sesuai dengan prinsip dan kaidah yang telah disepakati bersama. Sementara profesionalisme politisi ditunjukkan dengan sikap dan usaha untuk berlaku dan bertindak tepat sebagai politisi. Hal ini tentunya sulit diwujudkan apabila tidak tertata system dan prosedur yang ada dalam tubuh organisasi partai politik. Sehingga profesionalisme partai politik perlu dilakukan dengan pembenahan struktur internal partai politik.

C. Perkembangan Sistem Kepartaian Dan Di Indonesia

1. Proses Pembentukan Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti terdapat tiga teori yang menjelaskan proses pembentukan partai politik.

- Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik mengatakan bahwa partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen yang ditentukan berdasarkan pengangkatan untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat.
- Kedua teori situasi historis yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas.
- Ketiga teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Teori modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan akan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi

2. Perkembangan Sistem Kepartaian di Indonesia

Berkembangnya sistem kepartaian di Indonesia, dibarengi dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat yang tidak dapat dikoordinasi dengan baik, dengan sendirinya menyebabkan banyaknya usaha dari elit politik yang berkuasa untuk memenuhi kepentingan pribadi dari para atau kelompok diatas kepentingan rakyat. Suatu sistem kepartai disebut adabtabel apabila ia mampu

menyatukan berbagai aspirasi menjadi satu kesepakatan bersama yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Sistem kepartaian yang efektif sekuran – kurangnya harus memiliki dua kapasitas, yakni:

- Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomic dan kekerasan.
- Kedua mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh system politik. Dengan demikian , system kepartai yang kuat menyediakan organisasi – organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga untuk mengasimilasikan kelompok – kelompok baru kedalam system politik.

Menurut Maurice Duverger (1967:207) dalam bukunya Political Parties, klasifikasi system kepartaian dapat di bedakan menjadi tiga bentuk adalah sebagai berikut.

- Sistem Partai Tunggal (One Party System)

Sistem partai tunggal terjadi jika dalam suatu negara hanya terdapat satu partai politik yang berperan dalam kurun waktu yang sangat lama. Ciri keberadaan system partai tunggal ini dalam suatu negara adalah kehidupan politik yang timbul penuh dengan suasana nonkompetitif. Sistem partai tunggal ini terdapat pada negara komunias seperti Rusia,Cina.

Kelemahan system ini adalah :

1. Tidak pernah menjamin adanya perlindungan terhadap HAM karena system ini selalu bersamaan dengan system kediktatoran yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berada pada satu tangan sehingga pelaksanaan kekuasaannya berlaku sewenang – sewenang.
2. Tidak tercapainya perwujudan masyarakat yang sejahtera.
3. Tidak adanya system control social.
4. Sistem ini tidak mengakui doktrin-doktrin demokrasi.

- Sistem Dwipartai

Sistem dua partai adalah dalam suatu negara hanya terdapat dua partai politik yang dominan berkompetisi dalam pemilu. Dalam system dua partai ini terdapat partai yang berkuasa karena menang dalam pemilu dan kedua terdapat partai politik yang menjadi oposisi karena kalah dalam pemilu. Misalanya di Amerika Serikat dan Inggris.

Sedangkan Sistem dua partai menurut Sartori adalah system kepartaian yang ditandai dengan format terbatas dan ideologi yang tidak terlalu jauh. Misalnya, terjadi di Inggris, Amerika Serikat, Denmark, Italia dan Chili. Dan menurut Budiardjo, sisyem dua partai dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi tiga syarat yaitu :

1. Komposisi masyarakat homogeny
2. Consensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan social yang pokok kuat.
3. Adanya konstitnuitas sejarah.

Kelebihan system ini adalah sebagai berikut :

1. Suara pemilu dihasilkan selalu mayoritas.
2. Terwujudnya stabilitas pemerintahan yang dapat berjalan sesuai dengan kurung waktu yang telah ditetapkan.
3. Pergantian pemerintahan dalam system cenderung berjalan normal
4. Program-program pemerintah cendrung berjalan denagn baik.
5. Adanya keterikatan pada konstitusi negara.

- Sistem Multypartai

Dalam negara dengan system multipartai terdapat beberapa partai politik yang hampir sama kekuatannya. Tiap-tiap partai politik mempertahankan politik tertentu tentang satu atau sejumlah persoalan tertentu dan memiliki ideologi politik yang beragam. Dalam sistem multipartai tidak ada satu partai yang dominan untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga membentuk koalisi dengan partai politik lainnya. Apabila dalam system multi, partai tidak ada partai yang dominan, kestabilan politik sulit untuk di pertahankan.

Sistem multipartai dianut oleh negara Indonesia, Prancis, dan Malaysia dan Belanda, dan Swedia. Sistem ini lebih menanamkan pada peranan di legislatif sehingga peranan lembaga eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri sehingga terpaksa membentuk koalisi.

Kelemahan system ini adalah :

1. Pemerintahan dalam keadaan tidak stabil.
2. Program – program pemerintah kurang berjalan dengan efektif.
3. Ideologi partai tidak lagi melandasi konstitusi Negara.
4. Mengurangi fungsi nasionalisme dalam suatu Negara.
5. Setiap individu di berikan kesempatan menjadi pemimpin.
6. Kontrol lebih banyak dilakukan oleh parpol (partai politik).

PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

A. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu adalah pemilihan orang – orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat.

B. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

1. Pemilu 1955 (Masa Parlemen)

Pemilu pertama kali di Indonesia yaitu pada tahun 1955. Pemilu 1955 ini dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 kali yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 september 1955 dan untuk memilih anggot konstituante pada tanggal 15 desember 1955.

2. Pemilu kedua pada tahun 1971-1997 (Masa Orde Baru)

Pemilu pada masa orde baru ini sistemnya sama yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (porposional), dan peserta pemilu yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.

- Pemilu 1971 Merupakan pemilu yang diselenggarakan bangsa indonesia, pemiluYang dilaksanakan pada tanggal 5 juli 1971 ini untuk memilih anggota DPR.
- Pemilu 1977 Pemilu kedua pada masa orde baru yang diselenggarakan pada tanggal 2 mei 1977.
- Pemilu 1982 Pemilu ini merupakan pemilu ketiga pada masa orde baru, pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 mei 1982.
- Pemilu 1987 Pemilu ini merupakan pemilu keempat yang diselenggarkan pada tanggal 23 april 1987. Pemilu 1992 pada tanggal 9 juni 1992. Pemilu 1997 pada tanggal 29 mei 1997.

3. Pemilu 1999-2009 (Masa Orde Reformasi)

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Dimana pemungutan dilaksanakan secara serentak di seluruh indonesia. Peserta pemilu pada tahun ini diikuti 48 partai politik. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004, yang memungkinkan rakyat memilih langsung dan pada tanggal 9 april 2009 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara serentak.

C. Asas – Asas Pemilihan Umum Di Indonesia

Berikut penjelasan asas-asas pemilu:

1. Langsung

Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak direct, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.

2. Umum

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Persyaratan untuk ikut memilih dalam pemilihan umum minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.

3. Bebas

Bebas berarti setiap Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan demikian, semua warga Negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapapun.

4. Rahasia (luber)

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Kerahasiaan ini merupakan rantai dari “makna” kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

5. Jujur dan Adil (jurdil)

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil memiliki dua makna, yakni adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu.

D. Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia

Berikut kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

- Kegiatan pendaftaran pemilih
- Pendaftaran peserta pemilu
- Penetapan peserta pemilu
- Kampanye peserta pemilu
- Pemungutan dan penghitungan

Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah sama – sama untuk mewujudkan demokrasi. Berikut proses dan pelaksanaan/penyelenggaraan pemilu :

- Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yaitu Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU). KPU ada yang berkedudukan di pusat ada yang di daerah. KPU pusat bertugas mengurus pelaksanaan pemilu di tingkat nasional. Sedangkan KPU di tingkat daerah bertugas menyelenggarakan pemilihan ditingkat daerah atau disebut pilkada.
- Penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007. Dari undang-undang tersebut diketahui bahwa pemilu di negara kita dilaksanakan dalam tiga tahapan, antara lain :
 1. Tahap pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPRD yang dipilih meliputi para wakil rakyat yang duduk di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
 2. Tahap kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden.
 3. Dan tahap ketiga yaitu pemilihan kepala daerah dan wakilnya.

ⁱTim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018)

M masan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011)

Setiati widihastuti dan Fajar Rahayuningsih, *Pendidikan Kewarganegaraan UntukSd/Mi Kelas VI*, (Jakarta: PT Pustaka Insan Mandiri,2008)

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Permasiyarakatan UUD NKRI 1945 dan Ketetapan MPR RI*, (JL. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta, 2017)